



## ***Collaborative Governance dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang***

**<sup>1)</sup>Faizal Rianto, <sup>2)</sup>Rendra Setyadiharja**

<sup>1) 2)</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji

Email Korespondensi: [faizalrianto@gmail.com](mailto:faizalrianto@gmail.com)

### ***Abstract***

*The Covid-19 pandemic is a public health crisis that demands a swift and effective policy response, but it cannot be optimally addressed by government actors alone. Previous studies have shown that collaboration between government and non-government actors is a key factor in successfully managing the pandemic. The research problem in this study is the involvement and roles of government and non-government actors in managing the Covid-19 pandemic in Tanjungpinang, as well as the contribution of collaboration between actors to the effectiveness of policy responses. This study aims to map, analyze, and elaborate on the roles of government and non-government actors in managing the Covid-19 pandemic in Tanjungpinang. This study uses a qualitative approach with a case study design, through in-depth interviews, documentation studies, and secondary data analysis. The results show that the success of managing the Covid-19 pandemic in Tanjungpinang is determined not only by the role of the government but also by collaboration with non-government actors, such as community organizations, religious institutions, local communities, and the private sector. This collaboration plays a crucial role in policy coordination, resource mobilization, and the implementation of vaccinations and health outreach.*

***Keywords:*** Governance; Collaborative Governance; Covid-19

### ***Abstrak***

Pandemi Covid-19 merupakan krisis kesehatan publik yang menuntut respons kebijakan yang cepat dan efektif, namun tidak dapat ditangani secara optimal hanya oleh aktor pemerintah. Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penanggulangan pandemi. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan dan peran aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang serta kontribusi kolaborasi antar aktor terhadap efektivitas respons kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan, menganalisis, dan mengelaborasi peran aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, tetapi juga oleh kolaborasi dengan aktor non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat, institusi keagamaan, komunitas lokal, dan sektor swasta. Kolaborasi ini berperan penting dalam koordinasi kebijakan, mobilisasi sumber daya, serta pelaksanaan vaksinasi dan sosialisasi kesehatan.

**Kata Kunci:** Pemerintahan, Pemerintahan Kolaboratif, Covid-19



## PENDAHULUAN

Kota Tanjungpinang adalah salah satu kabupaten/kota yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan 13.549 kasus terkonfirmasi dan 444 kasus meninggal dunia, Kota Tanjungpinang adalah kabupaten/kota dengan kasus terkonfirmasi dan meninggal dunia tertinggi kedua setelah Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ini menempatkan Pemerintah Kota Tanjungpinang pada situasi krisis kebijakan publik yang menuntut respon cepat, adaptif, dan efektif dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sosial.

Sebagai respon terhadap pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar program vaksinasi bagi seluruh penduduk usia 12-17 tahun, usia diatas 18 tahun, penduduk lanjut usia (lansia), hingga anak-anak usia 6-11 tahun. Tingkat vaksinasi penduduk usia diatas 18 tahun adalah sebesar 94,02% untuk dosis pertama dan 85,07% untuk dosis kedua. Pada penduduk lansia, tingkat vaksinasi adalah sebesar 92,47% untuk dosis pertama dan 83,81 untuk dosis kedua, sementara tingkat vaksinasi penduduk usia 12-17 tahun mencapai 99,13% untuk dosis pertama dan 91,47% untuk dosis kedua (Statistik Data Kasus Covid-19). Tingginya tingkat cakupan vaksinasi merupakan gambaran bahwa terdapat respon yang relatif berhasil dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

Namun demikian, capaian tersebut menimbulkan pertanyaan penting dalam perspektif administrasi publik, yakni apakah keberhasilan respon tersebut merupakan hasil dari kapasitas dan kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai aktor utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, atau, justru merupakan hasil dari proses kolaboratif antara pemerintah dengan berbagai aktor non-pemerintah lainnya. Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat pandemi Covid-19 merupakan krisis multidimensional yang tidak dapat ditangani secara efektif hanya melalui pendekatan birokratis, melainkan diperlukan keterlibatan lintas sektor dan aktor dalam penganggulannya.

Sejumlah studi dan literatur menunjukkan bahwa penanggulangan pandemi Covid-19 tidak hanya terpusat pada upaya aktor-aktor pemerintah semata, namun juga, melibatkan upaya dan kolaborasi signifikan bersama aktor-aktor non-pemerintah. Kolaborasi antar aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah merupakan kunci yang memungkinkan respon yang tepat dapat dihasilkan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 (Choi, 2020). Dalam konteks Indonesia, (Bonso & Irwan, 2021; Djalante et al., 2020; Ginanjar, 2020; Indarto & Ratnawati, 2021; dan Megawati et al., 2020) juga mencatat bahwa aktor-aktor non-pemerintah turut berperan serta dalam menahan laju penyebaran dan penularan virus Covid-19 di



Indonesia, terutama pada masa-masa awal pandemi disaat kapasitas negara pada saat itu masih terbatas. Temuan serupa juga ditunjukkan dalam beberapa literatur internasional. Cyr et al., (2021), Hsieh et al. (2021), Huang (2020) dan Mao (2020), bahkan mengindikasikan bahwa kolaborasi dan peran serta aktor-aktor non-pemerintah turut serta menjadi faktor keberhasilan dalam pengendalian pandemi Covid-19 di Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Argentina, serta Uruguay. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan pendekatan strategis dalam tata kelola kesehatan publik, terutama dalam konteks penanggulangan pandemi Covid-19. Namun, meskipun literatur-literatur terdahulu menekankan pentingnya kolaborasi antar aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19, sebagian besar dari literatur tersebut bersifat normatif atau hanya fokus pada tingkat nasional suatu negara. Studi internasional umumnya menekankan pada peran *collaborative governance* pada negara-negara yang memiliki kapasitas kelembagaan yang relatif kuat, sementara studi pada Indonesia lebih fokus pada peran aktor-aktor non-pemerintah secara umum, tanpa melakukan pemetaan secara empiris tentang pola hubungan, mekanisme kolaborasi, serta dinamika antar aktor pada tingkat daerah.

Oleh karenanya, penelitian ini menjadi relevan dalam perspektif kebijakan publik karena penelitian ini berupaya untuk memetakan, menganalisa, serta mengelaborasi keterlibatan dan peran serta aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam upaya-upaya penanggulangan pandemi Covid-19 di tingkat pemerintah daerah. Secara teoritis, penelitian ini berupaya untuk berkontribusi pada pengayaan kajian *collaborative governance* dalam konteks krisis kesehatan publik, khususnya pada tingkat pemerintah kota. Secara praktis, tujuan penelitian ini adalah untuk menjadi bahan pembelajaran pada tingkat pemerintah kota dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan penanggulangan krisis berbasis kolaborasi antara aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah. Dengan menjadikan respon penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang sebagai studi kasus, penelitian ini menawarkan *novelty* (kebaharuan) melalui kajian empiris mengenai praktik kolaborasi antar aktor-aktor yang terlibat.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Collaborative Governance* dan Pandemi Covid-19

Harus disepakati bahwa dalam situasi darurat seperti sekarang ini, penanggulangan pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata. Kolaborasi dengan masing-masing *stakeholders* pada berbagai level untuk duduk bersama dalam suatu forum, membangun pemahaman dan komitmen, serta



meningkatkan rasa tanggungjawab secara kolektif untuk segera mengakhiri pandemi, tentu sangatlah penting (Megawati et al., 2020). Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan yang dapat menciptakan sinergi antar *stakeholders* untuk berkolaborasi secara bersama-sama guna menanggulangi pandemi Covid-19.

Salah satu pendekatan dalam kolaborasi antar *stakeholders* adalah *Collaborative Governance* (CG). CG adalah sebuah pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008). Ansell & Gash (2008) kemudian membangun model CG (lihat: Ansell & Gash, 2008, dan merumuskan enam kriteria penting berdasarkan pada definisi CG tersebut, yakni: (1) forum yang diprakarsai oleh lembaga atau institusi publik, (2) peserta dalam forum termasuk aktor non-pemerintah, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik, (4) forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif, (5) forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik), dan (6) fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen publik.

Di Indonesia, studi mengenai CG dan kaitannya dengan penanggulangan pandemi Covid-19 menghasilkan literatur yang beragam. Tjahjono et al. (2021) misalnya, mengidentifikasi enam aktor yang terlibat dalam CG di Indonesia, yakni: pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pihak swasta dan media, pusat-pusat kesehatan dan rumah sakit, akademisi, serta pihak militer. Sejalan dengan hasil identifikasi tersebut, pada level kabupaten/kota, juga terdapat aktor-aktor kolaborasi yang berbeda. Pada Kabupaten Gianyar (Arisanti & Suderna, 2020) misalnya, aktor kolaborasi bersama pemerintah daerah adalah Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); di Kota Padang, mitra pemerintah terdiri dari akademisi, masyarakat, pihak swasta, serta media masa yang membentuk *penta helix* (Putera et al., 2020); dan di Kota Surabaya terdiri atas pemerintah, komunitas masyarakat, organisasi profesional dan keagamaan, serta asosiasi pengusaha (Megawati et al., 2020).

Namun begitu, beberapa literatur juga setuju bahwa masih terdapat kelemahan serta kekurangan dalam pendekatan CG secara umum. Kurangnya koordinasi antar aktor, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dan tindakan pencegahan Covid-19, serta kurangnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan adalah tantangan yang dihadapi dan diidentifikasi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 (Indarto & Ratnawati, 2021). Sementara dominasi pemerintah daerah, kompleksitas



dari perubahan kebijakan, kapasitas struktur organisasi, masalah komunikasi dan koordinasi juga tercatat sebagai kelemahan-kelemahan yang ada dalam CG (Amin et al., 2021).

Jika dikaitkan dengan pandemi Covid-19, CG merupakan salah satu alternatif pendekatan yang dapat digunakan saat ini karena kebijakan yang dihasilkan oleh CG lebih dapat diterima oleh publik (Cyr et al., 2021). Hal ini karena pemerintah, bersama-sama aktor non-pemerintah seperti akademisi, masyarakat, pihak swasta, serta media masa, dapat saling membantu dan saling mendukung dalam penanggulangan krisis kesehatan publik. Harapannya adalah, dengan melibatkan banyak *stakeholders*, maka, krisis kesehatan publik yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dapat ditangani secara optimal (Indarto & Ratnawati, 2021; Kabullah et al., 2021; Perdana et al., 2021; Putera et al., 2020).

Literatur yang fokus pada krisis kesehatan publik saat ini juga mendukung CG sebagai konsep yang dapat diterapkan sebagai respon penanggulangan pandemi Covid-19. Seperti misalnya, studi yang dilakukan di Taiwan menyimpulkan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, koordinasi dan upaya bersama aktor-aktor non-pemerintah, serta mobilisasi pihak swasta adalah elemen-elemen kritis dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Kolaborasi antar aktor-aktor tersebut kemudian membantu menjaga kelemahan masing-masing aktor, yang pada akhirnya, menghasilkan kebijakan yang diinginkan, yaitu keberhasilan dalam pengendalian pandemi Covid-19 (Hsieh et al., 2021; Huang, 2020).

Studi lainnya, yang mengacu pada model CG di China, Jepang, dan Korea Selatan, juga menunjukkan bahwa tiap-tiap model kerjasama masing-masing negara memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan respon terhadap pandemi Covid-19 (Mao, 2020). Studi tersebut menyimpulkan bahwa dengan hanya bergantung pada intervensi pemerintah saja, seperti pada pengambilan keputusan dan kapasitas implementasi, tidaklah cukup untuk mengelola krisis seperti Covid-19 yang semakin kompleks tantangannya. Jika berkaca pada model CG di China, Jepang, dan Korea Selatan, kunci untuk mengatasi tantangan tersebut adalah melalui kolaborasi antara pemerintah dan aktor-aktor non-pemerintah dengan menggerakkan elemen-elemen masyarakat, pihak swasta, dan organisasi-organisasi sosial.

Studi yang dilakukan oleh Cyr et al. (2021) di Brazil, Uruguay, dan Argentina, juga menemukan bahwa kolaborasi memang diperlukan untuk mencegah dampak kesehatan yang terburuk dari pandemi Covid-19. Studi tersebut mencatat bahwa dengan lebih banyak aktifitas kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, jumlah



kematian yang dikaitkan dengan Covid-19 cenderung lebih rendah. Tidak hanya itu, studi tersebut juga mengkonfirmasi bahwa ketika organisasi sosial berkolaborasi dalam pendeteksian penularan, pendistribusian vaksin, dan kegiatan vaksinasi, maka, jumlah kematian cenderung menurun secara substansial jika dibandingkan dengan tidak ada kolaborasi.

Studi Cyr et al. (2021) juga menjelaskan bahwa kolaborasi dapat dibangun tidak hanya melalui kerjasama dan konsensus dengan lembaga publik semata, namun, kolaborasi juga dapat dibangun dengan melibatkan akademisi, lembaga swasta, serta gerakan-gerakan sosial. Hasilnya adalah, Uruguay dan Argentina berhasil menahan naiknya angka kematian pandemi Covid-19 sejak dini, sementara Brazil, yang tidak menerapkan kolaborasi antar *stakeholders*, mengalami kesulitan. Disini, dapat dilihat bahwa kolaborasi dengan aktor non-pemerintah di Uruguay dan Argentina memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan sumber daya dari berbagai *stakeholders*. Kolaborasi tersebut juga membuat kebijakan pemerintah menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh publik, serta membantu menghasilkan kebijakan untuk berbagi dan tidak bersaing atas sumber daya yang terbatas, terutama antar pemerintah daerah. Hanya saja, ketika kolaborasi tersebut runtuh, beban kasus dan kematian per kapita Argentina, tercatat mengalami peningkatan.

## METODE PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari aksi pengumpulan data terhadap responden penelitian melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari pihak kedua atau dari sumber lain yang tersedia sebelum dan selama penelitian dilakukan. Responden penelitian terbagi atas responden pemerintah dan responden non-pemerintah. Responden pemerintah terdiri atas institusi atau unit kerja pemerintah. Untuk responden non-pemerintah, pihak-pihak terkait yang bukan merupakan institusi atau unit kerja pemerintah. Teknik penarikan sampel terhadap responden penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada pertimbangan atas pengetahuan yang mendalam terhadap respon penanggulangan pandemi Covid-19 atau terhadap keterlibatan secara strategis dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Sementara itu, metode observasi lapangan dilakukan melalui pengamatan kondisi nyata yang terjadi dilapangan. Metode observasi dilakukan dengan cara non-partisan yang berarti bahwa peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan-





kegiatan objek yang diteliti. Adapun hal-hal yang diobservasi adalah: respon terhadap penanggulangan pandemi Covid-19, kegiatan-kegiatan terkait dengan upaya-upaya dalam penanggulangan pandemi Covid-19, serta kegiatan, upaya dan fenomena lainnya yang relevan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kolaborasi dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang**

Peran Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang sebagai aktor pemerintah sangat sentral dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Namun begitu, hasil studi dan literatur terdahulu menunjukkan bahwa penanggulangan pandemi Covid-19 tidak hanya terpusat pada upaya aktor-aktor pemerintah semata, namun juga, melibatkan upaya dan kolaborasi bersama aktor-aktor non-pemerintah. Kolaborasi antar aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah merupakan kunci yang memungkinkan respon yang tepat dapat dihasilkan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Bentuk kolaborasi sebagai respon awal dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dapat dilihat pada kegiatan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang. Melalui Tim Gugus Tugas tersebut, inisiator kerjasama dipegang oleh aktor pemerintah, khususnya oleh Walikota Tanjungpinang, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Daerah. Tim gugus tugas ini terdiri atas lima gugus tugas (kesehatan, area dan transportasi publik, pendidikan, komunikasi dan publikasi, serta karantina) yang melibatkan berbagai unsur mulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tanjungpinang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi kemasyarakatan, serta dukungan pihak swasta dan pelaku usaha. Pembentukan gugus tugas ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antar aktor-aktor yang berkepentingan guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

Aktor-aktor pemerintah tentunya berperan dalam banyak hal selama masa pandemi Covid-19 dan peran tersebut dapat dilihat pada beberapa kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing gugus tugas yang dirangkum pada tabel 1, sebagai berikut:



**Tabel 1. Kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang**

<b>Gugus Tugas</b>	<b>Kegiatan</b>
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan tindak lanjut atas hasil lab.</li> <li>• <i>Screening</i> Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pantauan (ODP), dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) di seluruh Puskesmas.</li> <li>• Analisis data harian kasus Covid-19.</li> </ul>
Area dan Transportasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan patroli pengamanan lalu lintas, serta melakukan kegiatan pengaturan dan penertiban lalu lintas.</li> <li>• Melakukan himbauan dan sosialisasi melalui <i>Area Traffic Control System</i> (ACTS).</li> </ul>
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kegiatan pemantauan kepada setiap sekolah untuk memastikan para guru untuk tetap memberikan tugas belajar kepada siswa/siswi melalui jaringan online.</li> </ul>
Komunikasi dan Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan himbauan sesuai dengan Surat Edaran Walikota Tanjungpinang Nomor: 422/Kesra Tahun 2020 Tentang Himbauan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Masjid, Surau, dan Mushola.</li> <li>• Melakukan pemberitaan dan pembaharuan berita atas pandemi Covid-19.</li> <li>• Menyampaikan infografis yang memuat data tentang pandemi Covid-19.</li> </ul>
Karantina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan himbauan kepada masyarakat berkenaan dengan pencegahan penyebaran virus Covid-19 agar masyarakat menerapkan pola hidup bersih.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan tugas rutin berupa pengisian air dan sabun cuci tangan, serta penyediaan tisu pada tandon air <i>portable</i>.</li> <li>• Memberikan sosialisasi tentang <i>physical distancing</i> (pembatasan jarak fisik) ditempat umum untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.</li> </ul>
--	---

Sumber: Laporan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang (30 Maret 2020, 30 April 2020, 31 Mei 2020)

Tidak hanya aktor-aktor pemerintah saja, dalam penelitian ini, para aktor-aktor non-pemerintah juga tercatat terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Keterlibatan para aktor non-pemerintah tentunya tidak dapat dikesampingkan, mengingat para aktor ini juga memiliki kesamaan tujuan dengan aktor-aktor pemerintah, yaitu untuk menekan laju penularan virus Covid-19 serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

Penelitian ini menemukan bahwa, keterlibatan aktor-aktor non-pemerintah seperti organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan merupakan salah satu kolaborator Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, dan merupakan kontributor signifikan atas keberhasilan dalam pencapaian tingkat vaksinasi yang tinggi di Kota Tanjungpinang. Organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan serta asosiasi pelaku usaha, berperan serta dengan tidak hanya menjadi peserta vaksinasi semata, namun, organisasi-organisasi tersebut juga turut serta menjadi fasilitator bagi program vaksinasi dengan cara menyediakan tempat bagi pelaksanaan vaksinasi. Umumnya, tempat-tempat vaksinasi ini adalah rumah-rumah ibadah, maupun gedung-gedung yang dimiliki oleh organisasi-organisasi ini.

Salah satu aktor non-pemerintah yang berkontribusi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang adalah Lembaga Adat Melayu (LAM). Sebagai mitra pemerintah dalam bidang pelestarian kebudayaan, LAM Kota Tanjungpinang berperan dalam beberapa hal, yakni:

- Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis dan teknis untuk menghadapi pandemi Covid-19. Kebijakan strategis tersebut meliputi kebijakan ekonomi yang cenderung memunculkan resistensi dari masyarakat karena perubahan-perubahan serta pembatasan-pembatasan yang mungkin terjadi. Sementara kebijakan teknis

berkaitan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

- Selama masa PPKM berlangsung di Kota Tanjungpinang, LAM menjadi bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. LAM bekerjasama dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta OPD terkait. Hal ini dilakukan oleh LAM karena LAM tidak hanya merupakan lembaga pelestarian kebudayaan semata, namun, LAM juga berperan dalam memberikan input berupa nasihat dan melakukan pendekatan ke masyarakat dalam aspek sosiologis.
- Kerjasama memang dilakukan LAM misalnya dengan satgas, dinas Kesehatan, dinas pendidikan, dinas kebudayaan, dan semua OPD yang terlibat. Karena posisi LAM sendiri sebagai lembaga adat yang dipandang oleh Pemerintah Daerah. Bentuk kolaborasinya:
  - Sosialisasi,
  - Membangun Kerjasama,
  - Memberikan penyuluhan dan pendekatan secara sosiologis,
  - Memberikan edukasi,
  - Memberikan nasihat terhadap kebijakan pemerintah,
  - Mencegah konflik di masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang sebagai aktor pemerintah sangat sentral dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Namun begitu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penanggulangan pandemi Covid-19 tidak hanya terpusat pada upaya aktor-aktor pemerintah semata, namun juga, melibatkan upaya dan kolaborasi bersama aktor-aktor non-pemerintah. Kolaborasi antar aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah merupakan kunci yang memungkinkan respon yang tepat dapat dihasilkan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.



## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang disarankan untuk terus memperkuat perannya sebagai koordinator utama dalam penanggulangan krisis kesehatan dengan mengedepankan tata kelola kolaboratif yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara terstruktur dan berkelanjutan. Penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor, kejelasan peran dan tanggung jawab aktor kolaboratif, serta sistem komunikasi publik yang transparan dan inklusif menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas respon kebijakan. Pengalaman penanggulangan pandemi Covid-19 ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran strategis dalam merancang model penanganan krisis di tingkat daerah yang lebih adaptif, responsif, dan partisipatif di masa mendatang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-sebesarnya disampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (KEMENRISTEK/BRIN) Republik Indonesia atas pendanaan penelitian melalui skema: Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. M., Febrina, R., & Wicaksono, B. (2021). Handling COVID-19 from a Collaborative Governance Perspective in Pekanbaru City. *Jurnal Bina Praja*, 1–13. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.1-13>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arisanti, N. M. D., & Suderna, I. W. (2020). *Penanganan Pandemi Covid-19: Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bersama KNPI Handling Covid-19 Pandemic: Collaboration Between District Government And KNPI Gianyar In The Gianyar District, Bali*. 15(2), 2020.
- Bonso, H., & Irwan. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19. *Journal of Governance and Politics (JGP)*, 1(2).
- Choi, Y. J. (2020). The Power of Collaborative Governance: The Case of South Korea Responding to COVID-19 Pandemic. *World Medical and Health Policy*, 12(4), 430–442. <https://doi.org/10.1002/wmh3.376>



- Cyr, J., Bianchi, M., González, L., & Perini, A. (2021). Governing a Pandemic: Assessing the Role of Collaboration on Latin American Responses to the COVID-19 Crisis. *Journal of Politics in Latin America*, 13(3), 290–327. <https://doi.org/10.1177/1866802X211049250>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Ginanjar, D. (2020). Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan COVID-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 52–68. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1005>
- Hsieh, C. W., Wang, M., Wong, N. W. M., & Ho, L. K. (2021). A whole-of-nation approach to COVID-19: Taiwan's National Epidemic Prevention Team. *International Political Science Review*, 42(3), 300–315. <https://doi.org/10.1177/01925121211012291>
- Huang, I. Y. (2020). Fighting COVID-19 through Government Initiatives and Collaborative Governance: The Taiwan Experience. *Public Administration Review*, 80(4), 665–670. <https://doi.org/10.1111/puar.13239>
- Indarto, K., & Ratnawati, S. (2021). Collaborative Governance (Collaborative Study of Actors in Handling the Spread of Covid-19 in Indonesia). *Journal of Research in Social Science and Humanities*, 1(2), 56–60. <https://doi.org/10.47679/jrssh.v1i2.13>
- Kabullah, M. I., Sudarmoko, Koeswara, H., & Rahman, F. (2021). Dysfunction of Collaborative Governance in the Handling Policy of Covid-19 at Jambi Province. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH) 2021*, 14(2).
- Mao, Y. (2020). *Combating COVID-19 Through Collaborative Governance: Lessons from East Asia*.
- Megawati, S., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). *Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City*.
- Perdana, V. A., Syafiqurrohman, A., Saputro, M. N. C. E., Hanif, N. A., Ahsan, M. M., & Husein, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah



Covid-19 Command Center. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 252–269.  
<https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11743>

Putera, R. E., Valentina, T. R., Wialdi, P. F., & Audina, N. (2020). *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0 Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang*.

Tjahjono, B., Suryono, A., & Amin, F. (2021). *Collaborative Governance Response to COVID-19 Pandemic in Indonesia*. 132–136.

